

Makalah Sejarah Panjang Perumusan Pancasila

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman prasejarah hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-VII sampai dengan pada masa merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah berjalan selama berabad-abad lamanya, dengan bermacam-macam cara dan secara bertahap. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.¹

¹Sutrisno, Slamet. 2006. Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD. Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya.

Pancasila memang menjadi dasar negara baru disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum di sahkan nilai-nilai pancasila sudah ada pada kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia menjadi sebuah negara dimana nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta religius. Nilai-nilai yang ada kemudian diambil dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang untuk nantinya dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu untuk memahami Pancasila secara utuh dan kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia ini diperlukan pemahaman sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara dan dijadikannya pancasila sebagai dasar negara karena semua itu berhubungan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pancasila bisa terbentuk?
2. Bagaimana Pancasila dari masa ke masa?
3. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Bangsa Indonesia?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea ke-4 (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.³

2.2 Pancasila Masa Sebelum Kemerdekaan

1. Masa Prasejarah (Zaman Batu)

Zaman prasejarah di Indonesia meliputi zaman batu tua (*palaeolithikum*), zaman batu tengah (*mesolithikum*), zaman batu muda (*neolithikum*), zaman batu besar (*megalithikum*). Pada zaman-zaman tersebut, manusia telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada zaman prasejarah telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk kesatuan yang menjalani hidupnya bersama-sama.

Zaman batu tua (*palaeolithikum*) ±600.000 tahun yang lalu hidup manusia jenis *Pithecanthropus Erectus* (manusia kera yang berdiri). Kehidupan manusia

pada

³<https://irdaaprianti.wordpress.com/2014/10/08/materi-2-konteks-sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia/>

3

masa ini masih nomaden dan melengkapi hidupnya dengan peralatan yang terbuat dari batu yang masih kasar (belum dihaluskan).

Pada zaman batu tengah (*mesolithikum*), beberapa manusia sudah ada yang hidup menetap dan masih ada juga yang nomaden, di masa ini sudah mulai mengenal adanya kepercayaan.

Selanjutnya pada zaman batu muda (*neolithikum*), manusia telah mampu membuat peralatan dari batu yang telah diasah, membuat anyaman, berbagai jenis kapak (kapak lonjong dan kapak persegi), dan kerajinan tangan. Mereka juga sudah mulai hidup berdagang, berlayar, beternak dan bercocok tanam. Pada zaman ini telah dilakukan pencarian dan pengumpulan bahan makanan. Ternyata di masa *neolitikum* ini tatanan masyarakat sudah teratur demokratis, dan memilih pemimpinnya dengan *primus inter pares* dalam bentuk kesukuan. Yang artinya sudah mulai berorganisasi.

Zaman batu besar (*megalithikum*) merupakan zaman dengan kebudayaan menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Yang dihasilkan pada zaman ini adalah menhir (tiang/tugu tempat memuja arwah nenek moyang), dolmen (meja batu berkaki menhir sebagai tempat sesajen untuk arwah nenek moyang), sarchopagus (peti batu bertutup), punden berundak-undak (naguan berundak-undak sebagai tempat pemujaan), dan arca (lambang pujaan).

Penyebaran nenek moyang di Indonesia adalah secara merantau menyebrangi lautan. Sehingga terbentuk kebudayaan secara turun-temurun, sebagian bangsa Indonesia adalah pelaut dan sebagian lagi adalah pengerajin, pedagang dan petani. Selain itu, bangsa Indonesia pada zaman prasejarah telah menganut sistem kepercayaan. Dengan demikian zaman prasejarah di Indonesia dapat dikatakan memberikan andil dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila.

2. Masa Kerajaan

- Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman ini pada tahun 400M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Aswawarman keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan

4

memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terimakasih raja yang dermawan. Masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.

- Kerajaan Sriwijaya

Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatera yaitu kerajaan Sriwijaya, di bawah kekuasaan bangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedukan Bukit di kaki bukit Siguntang dekat Palembang tahun 683 M, dalam bahasa melayu kuno huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan Maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu-lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti selat Sunda, dan kemudian selat Malaka. Pada zaman itu kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan asia selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja yang disebut *Tuhan An Vatakvurah* sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan dagangannya. Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rokhaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai Ketuhanan.

Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu pusat pendidikan agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di tempat

tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya misalnya Dharmakriti.⁴ Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara adalah tercemin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu

⁴<http://www.kompasiana.com/jaeabidinmerahhitam.blogspot.in/universitas-nalanda-membuka-kembali-lembaran-sejarah-tempat-nenek-moyang-kita-berkuliah-di-india.html>

5

berbunyi '*marvuat vanua criwijaya dhayatra subhiksa*' (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur).⁵

- Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.

Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis *Negarakertagama*. Dalam kitab tersebut terdapat istilah "Pancasila". Empu tantular mengarang buku Sutasoma, dan didalam buku itulah kita jumpai selogan persatuan nasional, yaitu "*Bhineka Tunggal Ika*", yang bunyi lengkapnya "*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*", artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki tuhan yang berbeda.⁶

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut : "selama aku belum menyatukan nusantara, aku takkan menikmati palapa, sebelum aku menaklukan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjungpura, Pulau Haru, Pahang,

Dompu, Pulau Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, aku takkan mencicipi palapa”.

Dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang bertugas memberikan nasehat kepada raja, hal ini sebagai nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit.

⁵<http://www.wacana.co/2015/09/kerajaan-sriwijaya-pusat-ilmu-dan-cahaya-buddha-di-asia/>

⁶<https://tatangmanguny.wordpress.com/kontroversi/sumpah-palapa-sumpah-mempersatukan-atau-sumpah-penjajahan/>

6

3. Masa Penjajahan

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang Portugis. Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia. Untuk menghindari persaingan diantara mereka sendiri, kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama V.O.C, yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah ‘kompeni’.

Praktek-praktek VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan, sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629, walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jendral J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua.

Makassar, yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai kompeni tahun 1667 dan timbullah perlawanan dari rakyat Makassar di bawah Sultan Hassanudin. Menyusul pula wilayah Banten (Sultan Ageng Tirtayasa) dapat ditundukkan pula oleh kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir abad ke XVII nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasaan. Demikian kompeni pada saat itu. Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar pimpinan Armada dari Minangkabau untuk mengadakan perlawanan bersama terhadap kompeni juga tidak mendapat sambutan yang hangat.

Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan yang terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan sehingga banyak menimbulkan korban.

4. Kebangkitan Nasional

Atas kesadaran bangsa Indonesia maka berdirilah Budi Utomo dipelopori Dr. Wahidin Sudirihusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Gerakan ini merupakan awal gerakan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Lalu mulailah berunculan organisasi lainnya. Dalam masalah ini munculah PNI (1927) yang dipelopori oleh Soekarno. Mulailah perjuangan bangsa Indonesia menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional.

7

Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuataannya sendiri. Diantaranya adalah Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada 20 Mei 1908, kemudian Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1909 serta Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono serta tokoh lainnya.

Sejak saat itu perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa serta satu tanah air yaitu Indonesia Raya.

5. Masa Penjajahan Jepang

Janji Belanda tentang Indonesia merdeka hanyalah suatu kebohongan belaka dan tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda tanggal 10 Maret 1940. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang memimpin Asia. Jepang saudara tua bangsa Indonesia”.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulangtahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa ‘kemerdekaan tanpa syarat’. Janji ini

diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara Sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau *Dokuritsu Zyumbi Tiosakai*. Pada hari itu juga diumumkan sebagai Ketua Dr. Radjiman Widyodiningrat yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara.

8

2.3 Pancasila Masa Persiapan & Saat Kemerdekaan

1. Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama 4 hari, berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut :

- Mr. Moh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara sebagai berikut : 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan

Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Moh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan Undang Undang Dasar RI

- Prof. Dr. Supomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan usulan Mr. Moh Yamin, Dalam pidatonya Prof. Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:

- Teori negara perseorangan (individualis): Menurut paham ini negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu • Paham negara kelas (class theory): Dalam teori ini negara adalah alat dari suatu golongan untuk menindas kelas lain
- Paham negara integralistik: Menurut paham ini negara bukanlah menjamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan

- Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam hal ini Ir. Soekarno menyampaikan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusnya yaitu:

- Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
- Internasionalisme (peri kemanusiaan)
- Mufakat (demokrasi)
- Kesejahteraan sosial

9

- Ketuhanan yang Maha Esa. (ketuhanan yang berkebudayaan)

Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau *philosophisce gronslag* juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai *weltanschauung* dan diatas dasar itulah kita dirikan negara Indonesia.

2. Sidang BPUPKI Kedua

Penyusunan Pancasila oleh panitia sembilan, serta pemakaian istilah “*hukum dasar*” diganti dengan undang-undang dasar karena hal ini merupakan hukum tertulis atas saran prof. Soepomo. Serta membahas bentuk negara yang setuju adalah pro republik. Keputusan-keputusan lain adalah membentuk panitia kecil. Perancang undang-undang dasar diketuai oleh Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan di ketuai oleh Moh. Hatta dan pembela tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejono.

Dalam sidang ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer

disebut dengan “*panitia sembilan*” yang anggotanya adalah sebagai berikut:

- Ir. Soekarno
- Wachid Hasyim
- Mr. Muh. Yamin
- Mr. Maramis
- Drs. Moh. Hatta
- Mr. Soebarjo
- Kyai Abdul Kahar Muzakir
- Abikoesmo Tjokrosoejoso
- Haji Agus Salim

Panitia sembilan ini mengadakan pertemuan secara sempurna dan mencapai suatu hasil baik, yaitu suatu persetujuan antara golongan islam dengan golongan kebangsaan. Adapun naskah pembuka yang disusun oleh panitia sembilan tersebut pada bagian terakhir adalah sebagai berikut :

“.....maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan

10

kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dalam sidang BPUPKI kedua ini, pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan istilah undang-undang dasar. Keputusan penting dalam rapat ini adalah tentang bentuk negara republik dan luas wilayah negara baru. tujuan anggota badan penyelidik adalah menghendaki Indonesia raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Susunan Undang Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas tiga bagian yaitu:

- Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan dimuka dunia atas Penjajahan Belanda
- Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar negara Pancasila •

Pasal-pasal Undang Undang Dasar.

3. Proklamasi & Sidang PPKI

Pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk PPKI. Untuk keperluan itu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan jendral besar Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jendral Terauchi memberikan kepada mereka 3 cap, yaitu :

- Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, Moh. Hatta sebagai wakil dan Dr. Radjiman sebagai anggota.
- Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. • Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia di serahkan sepenuhnya pada panitia.

Sekembaliannya dari Saigon 14 Agustus 1945, Ir. Soekarno mengumumkan dimuka umum bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin) dan kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan dari hasil perjuangan sendiri. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang

11

kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl. Imam Bonjol No.1).

Perbedaan terjadi antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan pelaksanaan proklamasi. Oleh karena itu perbedaan memuncak dan menyebabkan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok agar tidak mendapat pengaruh Jepang.

Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut

akhirnya konsep Soekarno lah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat (Jam 11.30 waktu jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmad dan diawali dengan pidato, sebagai berikut:

P R O K L A M A S I

*Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat
singkatnya.*

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta

Sehari setelah Proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama.

12

SIDANG PPKI

Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan 3 (tiga) hal:

1. Menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir Soekarno dan Moh Hatta.
3. Membentuk sebuah Komite Nasional, untuk membantu Presiden.

Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pembukaan Alinea IV mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting dalam sidang ini yaitu perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam

Piagam Jakarta, yaitu tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi “Ke Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Sidang PPKI tersebut, Moh. Hatta menyatakan, bahwa masyarakat Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ...”. Usulan tersebut disampaikan sebagai masukan sebelum sidang yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang bertugas di Indonesia Timur, yang bernama Nishijama. Dengan jiwa kebangsaan, para pendiri negara menyepakati perubahan Piagam Jakarta. Dengan demikian, sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar itu hanya mengikat sebagian rakyat Indonesia, sekalipun terbesar, itu dirasakan oleh golongan-golongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.

Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 agustus 1945, sebelum Sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera

13
mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan tidak sebagai bangsa, mereka mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa. Rumusan sila sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan sila-sila Pancasila tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

2.4 Pancasila Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan NICA (Netherland Indies Civil Administration). Selain itu Belanda juga secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa Proklamasi RI merupakan hadiah fasis Jepang.

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia Internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat :

1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian maklumat tersebut

⁷<http://materi4belajar.blogspot.co.id/2016/05/hasil-sidang-ppki-1-2-3-tanggal-18-19-22-agustus-1945.html>

memberikan kekuasaan tersebut kepada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP.

2. Maklumat pemerintah tanggal 03 Nopember 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara Proklamasi sebagai negara Demokratis.
3. Maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya maklumat

ini mengubah sistem kabinet Presidential menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal.

PEMBENTUKAN NEGARA RIS

Sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO), dan Belanda. Indonesia terbagi ke dalam beberapa negara bagian hal ini sangat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama, Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan negara Republik Indonesia, yaitu Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau. Negara Padang bergabung dengan negara Sumatra Timur, Sabang bergabung dengan Aceh.

TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1950

Sampai akhirnya RIS hanya terdiri dari: Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia. Ketiga negara ini kemudian bersama sepakat untuk kembali ke negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dan memakai UUDS 1950 sebagai konstitusi sementara.

Walaupun UUDS 1950 merupakan tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi

15
kepada Pemerintah yang berasas Demokrasi Liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila.

Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentang waktu 1950-1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Selain itu ada pertentangan tajam dalam Konstituante yang merembet ke masyarakat, termasuk partai politik.⁸

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959 keadaan tatanegara Indonesia mulai stabil, namun keadaan ini dimanfaatkan oleh kalangan komunis dengan menanamkan ideologinya. Ideologi pada saat itu dirancang oleh PKI dengan ideology Manipol Usdek serta konsep Nasakom. Puncak peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI, pemberontakan ini disertai dengan pembunuhan para Jendral yang tidak berdosa. Pemberontakan PKI tersebut berupaya untuk mengganti secara paksa ideologi dan dasar filsafat negara Pancasila dengan ideologi komunis Marxis. Atas dasar tersebut maka pada tanggal 1 Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai 'Hari Kesaktian Pancasila'

⁸<https://mediabacaan.blogspot.co.id/2013/03/tahun-1950-merupakan-periode-krusial.html>

2.5 Pancasila Masa Orde Baru

Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta UUD 1945 demi kepentingan kekuasaan. Munculnya orde baru

diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lainnya. Aksi tersebut menuntut tiga tuntutan atau yang dikenal dengan 'Tritura', adapun isi tritura tersebut sebagai berikut :

- a. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
- b. Pembersihan kabinet dari unsur G 30 S PKI
- c. Penurunan harga

Karena orde lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto dalam bentuk suatu surat yang dikenal dengan 'surat perintah 11 Maret 1966' (Super Semar). Tugas pemegang super semar yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.⁹

⁹<http://www.kompasiana.com/andisulistyo/pancasila-di-masa-orde-baru.html>

BAB III

KESIMPULAN

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah

melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaannya yang tua, melalui gemilangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian mengalami masa penjajahan tiga setengah abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan.

Berbagai babak sejarah telah dilampaui dan berbagai jalan telah ditempuh dengan cara yang berbeda-beda, mulai dengan cara yang lunak sampai cara yang keras, mulai dari gerakan kaum cendekiawan yang terbatas sampai pada gerakan yang menghimpun kekuatan rakyat banyak, mulai dari bidang pendidikan, kesenian daerah, perdagangan sampai pada gerakan-gerakan politik. Bangsa Indonesia lahir

sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara

proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yaitu "*Pancasila*".¹⁰

¹⁰Dr. H. Kaelan, M.S, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2008

- Dr. H. Kaelan, M.S, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2008
- <https://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndangDasarSementaraRepublikIndonesia>
- <https://irdaprianti.wordpress.com/2014/10/08/materi-2-konteks-sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia/>
- <http://iqball10.blogspot.co.id/2012/10/penyimpangan-penyimpangan-konstitusi.html>
- <http://materi4belajar.blogspot.co.id/2016/05/hasil-sidang-ppki-1-2-3-tanggal-18-19-22-agustus-1945.html>
- <https://mediabacaan.blogspot.co.id/2013/03/tahun-1950-merupakan-periode-krusial.html>
- <https://repaldiabdulagi453.wordpress.com/2014/10/08/pancasila-dalam-konteks-sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia/>
- <http://shareilmurahma.blogspot.co.id/2016/03/pancasila-dalam-kajian-sejarah-bangsa.html>
- <https://tatangmanguny.wordpress.com/kontroversi/sumpah-palapa-sumpah-mempersatukan-atau-sumpah-penjajahan/>
- <https://tgkboy.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-indonesia-pada-masa.html>
- <http://www.kompasiana.com/andisulistyo/pancasila-di-masa-orde-baru.html>
- <http://www.kompasiana.com/jaeabidinmerahhitam.blogspot.in/universitas-nalanda-membuka-kembali-lembaran-sejarah-tempat-nenek-moyang-kita-berkuliah-di-india.html>
- <http://www.wacana.co/2015/09/kerajaan-sriwijaya-pusat-ilmu-dan-cahaya-buddha-di-asia/>
- Marzuki, Mansur. 2008. Yogyakarta. Jurnal Hukum Vol. 15 No. 1
- Rondonuwu, Patrice. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta. Nagakusuma Media Kreatif.
- Sutrisno, Slamet. 2006. Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta. Penerbit Andi.

www.dpr.go.id

www.mahkamah.konstitusi.go.id